

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentunya membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat (2) menegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Maksudnya bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah, mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi serta mendapatkan pengajaran yang baik dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional bagi Bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu betapa pentingnya membina dan mengarahkan siswa agar menjadi manusia yang mampu dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Gerakan Reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokratis, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan dalam sistem pendidikan nasional. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan di antaranya pembaruan kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan baik melalui pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum dibuat di setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan mesin utama pendidikan yakni pembelajaran. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekolah mengemban tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di kalangan masyarakat.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara agar mampu memahami dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dalam pembelajaran PPKn para siswa dipersiapkan sebagai warga Negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi warga Negara yang baik.

Dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn acuan yang menjadi pedoman seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dalam Lampiran 20 PERMENDIKBUD No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn khususnya kelas XI pada materi Sistem dan Dinamika Pancasila ialah:

1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **2.2** Berprilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. **3.2** Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. **4.2** Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam proses belajar mengajar yang menjadi materi pembelajaran Sistem dan Dinamika Pancasila SMA/MA meliputi (1) Hakikat Demokrasi, (2) Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila, (3) Priorisasi Perkembangan Demokrasi di Indonesia, (4) Membangun Kehidupan yang Demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh).

Materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan peserta didik di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu setiap peserta didik sebaiknya memahami dan dapat mengaplikasikannya. Materi ini juga berperan untuk mendewasakan peserta didik mempunyai sikap yang demokratis. Pemahaman akan materi ini juga akan menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang mengetahui nilai-nilai yang diperlukan untuk menegakkan sebuah pemerintahan yang demokratis. Terlebih peserta didik merupakan pemilih pemula nantinya yang juga sangat diperlukan untuk dapat menjadi partisipasi aktif dalam pemilihan umum.

Pada pengamatan awal, peneliti mendapatkan peserta didik di SMA Negeri 13 Medan belum secara menyeluruh memahami materi tersebut. Dikarenakan beberapa hal seperti sebagian peserta didik tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama, daya serap peserta didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat.

Dalam proses belajar mengajar, keaktifan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh setiap guru sehingga proses belajar mengajar yang ditempuh akan benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat dan latar belakang masing-masing.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Tingkat Pemahaman Siswa Kelas XI Terhadap Materi PPKn Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di SMA Negeri 13 Medan”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki fokus penelitian agar hasil penelitian tersebut lebih terfokus. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah, dan untuk mempermudah penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Penelitian dilakukan untuk

mengetahui tingkat pemahaman siswa di SMA Negeri 13 Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020.”

1.3 Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas XI terhadap materi PPKn sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di SMA Negeri 13 Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan haruslah memiliki tujuan tertentu untuk mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan, untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab masalah dari suatu penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi PPKn sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di SMA Negeri 13 Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Konseptual

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terkait pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada pemahaman materi PPKn sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dapat dijadikan acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap materi PPKn sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di SMA Negeri 13 Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

c. Bagi masyarakat

Mengetahui pentingnya pemahaman sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.